



RENJA 2022

**Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Medan**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan tahunan yang dibuat setiap tahunnya oleh masing-masing OPD, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD pada awal periode perencanaan pembangunan Kota. Rencana Kerja (RENJA) memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (RENJA) disusun mengacu pada kerangka pokok yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Rencana Kerja (RENJA) tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap OPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya dibidang administrasi kependudukan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Medan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Medan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dibentuk melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) dengan 4(empat) program dan dibagi dalam beberapa jenis kegiatan. Selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan program yang berbasis Kinerja, maka dalam Renja ini digambarkan *Input*, *Output* dan *Outcome*, sehingga setiap tahunnya bisa dilihat capaian kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam prosesnya Penyusunan Renja ini dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Munsrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota dan akan berakhir pada Asistensi dengan anggota DPRD Kota Medan. Pelaksanaan Asistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didampingi dan difasilitasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan yang pada gilirannya nanti, hasil dari asistensi ini akan dituangkan ke dalam suatu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) satu tahun kedepan. Dengan demikian, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman pokok pengelolaan urusan kependudukan tahun 2022

1.2 Landasan Hukum

Landasan pokok penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
 18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 19. Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
 20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Secara garis besar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan Kota khususnya dibidang Administrasi Kependudukan yang menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selama kurun waktu 2022.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2022 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Administrasi

Kependudukan untuk 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Medan Sadar Adminduk.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dengan RENJA K/L dan Rencana Kerja (RENJA) Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing–masing, dengan format sesuai halaman terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel T-C.30 sebagaimana format terlampir.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; khusus kota, uraikan mengenai

koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah kota dengan perangkat daerah kecamatan/ kelurahan serta dengan provinsi dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan kota;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program provinsi dan nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan - temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan ditambah tabel T-C.31, sebagaimana halaman lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan

hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai :
 - a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal :

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

 - Pencapaian SDGs;
 - Pengentasan Kemiskinan;
 - Pencapaian NSPK dan SPM;
 - Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;
 - Pengembangan Daerah Terisolir

- Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan;
 - Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai Kawasan dan apa saja yang Terfokus pada Kawasan atau Kelompok Masyarakat tertentu);
 - Total Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaannya;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Rencana Kerja (RENJA) Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2022 tidak lepas dari Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Tahun 2021 – 2026 guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Medan. Seperti diketahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam menetapkan prioritas program/kegiatan sebagaimana apa yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi bahkan dari Pemerintah Pusat merupakan urusan dasar namun bukan wajib yang harus dilaksanakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka penataan administrasi kependudukan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tahun 2021 – 2026 dikaitkan dengan program dan kegiatan disajikan sebagai berikut :

1. Pencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
2. Menyusun analisis kebutuhan sarana/prasarana pelayanan administrasi kependudukan dalam mall pelayanan publik;
3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penerapan sistem dan prosedur/SOP selama jam kerja termasuk Survey Kepuasan Masyarakat(SKM);
4. Menyelenggarakan pelayanan keliling secara kreatif dan inovatif termasuk kerjasama pelayanan adminduk.

Adapun kendala–kendalayang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, antara lain :

1. Validasi data kependudukan yang belum optimal di dalam *data base*;
2. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting dari masyarakat, antara lain pelaporan kelahiran dan kematian sehingga kepemilikan dokumen pencatatan sipil masih relatif rendah terutama akta kematian;
3. Akses pelayanan administrasi kependudukan masih terbatas, seperti fasilitas/sarana dan prasana;
4. Opini masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap pengurusan dokumen kependudukan masih rendah.

2.1.1 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan, pada tahun anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mengelola anggaran belanja langsung dan tidak langsung dengan target sebesar Rp. 37.499.399.872,- dan realisasi sebesar Rp. 31.752.574.082,- yang terdiri dari target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.168.968.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.740.799.379,- dan target Belanja Langsung sebesar Rp. 19.330.431.872,- dengan realisasi sebesar

Rp.17.011.774.703,- yang bersumber dari dana DAU dan DAK. Adapun target rincian belanja langsung tersebut adalah :

1. Belanja Langsung dari DAU sebesar Rp. 11.634.444.920,-
2. Belanja Langsung dari DAK sebesar Rp. 7.695.779.000,-

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Medan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Realisasi renja Perangkat daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	Tertib Administrasi								
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survey Kepuasan Terhadap Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telpon, air, listrik, akses internet dan televisi berlangganan	24 rekening	12 rekening	4 rekening	4 rekening	100 %	0	16 rekening	66 %
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Jasa Kebersihan Kantor Beserta Kelengkapannya	180 jenis	60 jenis	30 jenis	30 jenis	100 %	0	90 jenis	50 %

		yang terdiri dari Sapu Plastik, Sabun Pembersih Lantai, Serok Sampah, Kantung Sampah Terpilah 3 Jenis, Alat Pembersih Kaca, Tempat Sampah, Pembersih Keramik, Alat Pembersih Debu, Tisu Kotak, Kain Pel, Kanebo, Kapur Barus, Sikat Sudut Kamar Mandi, Ember Uk. 50 Liter, Ember Kecil, Gayung, Masker, Sabun Cuci Tangan, Sabun Cuci Piring, Pengharum Ruangan, Alat Pengharum Ruangan, Keset Sabut untuk Kebersihan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibiayai								
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terdiri dari Kertas Hvs, Tipe-X, Buku Ekspedisi, Buku Folio Isi 200, Map	150 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	100 %	0	75 jenis	50 %

		Plastik Folio, Lem Cair, Bantalan Stempel, Tinta Stempel Biru, Pulpen, Stabilo, Spidol Permanen, Pena Tinta (signo), Balliner, Kertas Kwarto, Kertas Label, Hekter, Lakban, Stempel Tanggal, Pembuka Hekter, Isi Staples Kecil, Isi Staples, Stop Map Plastik, Pensil, Kertas Nomor Antrian, Binder Klip Kecil, Binder Klip Sedang, Paper Clip Sedang, Double Tape								
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang terdiri dari Lampu TL 20 w, Lampu TL 40 w, Saklar Ganda, Baterai AAA, Baterai AA, Baterai Besar, Stop Kontak, Solasiban, MCB, Lampu 45 Watt, Lampu 60 Watt,	102 jenis	34 jenis	17 jenis	17 jenis	100 %	0	51 jenis	50 %

		Automatic Elektronik, Kabel NYM 2 x 1,5 mm, Kabel NYM 2 x 10 mm								
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Out put : Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang dibiayai	336 orang	112 orang	56 orang	56 orang	100 %	0	168 orang	50
2.06.2.06.01.01.22	Pemeliharaan dan pengamanan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah biaya Sewa Gudang untuk menyimpan barang – barang aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	0	36 bulan	50
2.06.2.06.01.01.23	Penyediaan penunjang operasional kesekretariatan dinas	Jumlah biaya Penunjang Operasional Kesekretariatan Dinas untuk Pelayanan Kepada Masyarakat yang terdiri dari Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat, Belanja Air Mineral Galon dan Belanja Air Gelas untuk Masyarakat yang berkunjung ke Dinas, serta Penyediaan	30 jenis	10 jenis	5 jenis	5 Jenis	100 %	0	15 jenis	50

		Kebutuhan Rumah Tangga Kantor lainnya								
2.06.2.06.01.01.25	Penyediaan surat kabar/ majalah dan bahan bacaan	Jumlah pembelian Surat Kabar/ Majalah dan Bahan Bacaan	52.200 eks	17.400 eks	8.700 eks	8.700 eks	100 %	0	26.100 eks	50 %
2.06.2.06.01.01.29	Pengadaan alat tulis kantor sarana teknologi informasi	jumlah tinta cartridge yang terdiri dari Black Toner HP 3525, Cyan Tonner HP 3525, Yellow Tonner HP 3525, Magenta Tonner HP 3525, Cyan Tonner HP 1515, Yellow Tonner HP 1515, Magenta Tonner HP 1515, Dot Metrik, Black Toner HP 93A, Black Toner HP 83A, Tonner Fotocopy SHARP, Toner Canon Ir 1024, Toner Minolta BZ 283, Black Toner HP 85A	90 jenis	30 jenis	15 jenis	15 jenis	100 %	0	45 jenis	50 %
2.06.2.06.01.01.31	Pengadaan cetakan umum	Jumlah cetakan umum yang terdiri dari Cetak Lembar kendali Pindah Datang antar Kabupaten Kota atau Antar Provinsi WNI, Cetak Lembar	96 %	32 jenis	16 jenis	16 jenis	100 %	0	48 jenis	50 %

		kendali Pindah antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi WNI, Kelengkapan Persyaratan Pengurusan Surat Keterangan Pindah, Cetak Kop Surat, Kop Surat Kepala Daerah Lambang Garuda Warna/ Emas Uk. F4 70gr, Cetak Lembar Kendali Kelahiran, Persyaratan Kelahiran, Lembar Kendali Perkawinan, Persyaratan Perkawinan, Surat Pernyataan Perkawinan, Lembar Kendali Kartu Keluarga, Persyaratan Kartu Keluarga, Tanda Terima Kartu Keluarga, Kwitansi Pembayaran, Cetak Resi, Cetak Map Dinas								
2.06.2.06.01.01.32	Pengadaan buku himpunan peraturan, leaflet dan booklet	Jumlah Buku Himpunan Peraturan, Leaflet,	18 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	0	9 jenis	50 %

		dan Booklet yang dicetak								
2.06.2.06.01.01.33	Pengadaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari Cetak Blanko Kartu Keluarga, Form Permohonan Kartu Keluarga (F.1.15), Form Pindah Datang (F.1.38), Form Pindah Antar Kelurahan (F.1.36), Form Pindah Antar Kecamatan (F.1.34), Form Biodata Penduduk (F.1.01)	18 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	0	9 jenis	50 %
2.06.2.06.01.01.34	Pengadaan blanko dan formulir pendaftaran pencatatan sipil (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil yang terdiri dari Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Pengakuan Anak, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Perceraian, Buku Registrasi Akta Kelahiran, Buku Registrasi Akta Perkawinan, Buku Registrasi	48 jenis	16 jenis	8 jenis	8 jenis	100 %	0	8 jenis	50 %

		Akta Kematian, Buku Registrasi Pengakuan Anak, Buku Registrasi Akta Perceraian, Form Akta Kelahiran, Form Akta Perkawinan, Form Akta Kematian, Form Akta Perceraian, Form Akta Pengakuan Anak, Buku Serba Guna								
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Survey Kepuasan terhadap Sarana dan Prasarana Kantor								
2.06.2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	127	45 jenis	21 jenis	21 jenis	100 %	0	66 jenis	51 %
2.06.2.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mobeleur yang tersedia	18 jenis	0	9 jenis	9 jenis	100 %	0	9 jenis	50 %
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yang terdiri dari penyewaan tanaman dan pemeliharaan gedung kantor	24 jenis	8 jenis	4 jenis	4 jenis	100 %	0	12 jenis	50 %
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya Bahan Bakar Minyak berupa Pertamina dan Solar Non	36	12 jenis	6 jenis	6 jenis	100 %	0	18 jenis	50 %

		Subsidi, Oli, Jasa Service Mobil, Perbaikan Kendaraan dan Suku Cadang								
2.06.2.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang terdiri dari Biaya Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset, Perbaikan Jaringan Listrik, Pemeliharaan Server, Pemeliharaan Mesin Fotocopy, Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor, Biaya Penggantian Suku Cadang Jaringan Dan Kelengkapannya	36	12 jenis	6 jenis	6 jenis	100 %	0	18 jenis	50 %
2.06.2.06.01.02.42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Tersedianya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	3 jenis	0	3 jenis	3 jenis	100 %	0	3 jenis	100 %
2.06.2.06.01.02.51	Pengadaan perangkat pencetakan KTP-EL untuk pelayanan masyarakat	Jumlah Perangkat Pencetakan KTP-EL Untuk Pelayanan Masyarakat yang terdiri dari Kamera	120 jenis	40 jenis	20 jenis	20 jenis	100 %	0	60 jenis	50 %

		KTP-El, Komputer beserta kelengkapannya, Finger Print, Card Reader Pencetakan KTP-EL, Card Reader Pembaca dan Kelengkapannya, Card Personalization Printer								
2.06.2.06.01.02.52	Pengadaan fasilitas pelakaan penerbitan KTP-EL (DAK)	Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan Penerbitan KTP-El yang terdiri dari Cleaning Kit, Tinta KTP-EL, Film KTP-EL, Samcard	30 jenis	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100 %	0	15 jenis	50 %
2.06.2.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Disiplin Aparatur								
2.06.2.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH)	8 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100 %	0	4 jenis	50 %
2.06.2.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	36 jenis	12 jenis	6 jenis	6 jenis	100 %	0	18 jenis	50 %
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Survey Kepuasan Aparatur terhadap Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

2.06.2.06.01.05.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan Jamani	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jasmani bagi Aparatur	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	0	2 kegiatan	40 %
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
2.06.2.06.01.06.11	Surveillance ISO pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Medan	Terlaksananya Surveillance ISO 9001 : 2015 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	0	2 kegiatan	40 %
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Survey Kepuasan Masarakat dalam Pelaksanaan Proses Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan								
2.06.2.06.01.15.17	Pelayanan pencatatan akta kelahiran di kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Keliling Akta Kelahiran di 21 Kecamatan di Kota Medan	21 kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	21 kecamatan	100 %		21 kecamatan	100 %
2.06.2.06.01.15.35	Sosialisasi interaktif dengan masyarakat melalui radio	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Interaktif dengan Masyarakat melalui Radio	72 kali	171.896.000	12 kali	12 kali	96,76	181.080.000	532.976.000	0

2.06.2.06.01.15.52	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	0	149.600.000	1 kegiatan	1 kegiatan	99,83	158.400.000	487.690.000	0
2.06.2.06.01.15.53	Pelayanan keliling pendaftaran penduduk (DAK)	Terlaksananya Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk di 21 Kecamatan di Kota Medan	21 kecamatan	21 kecamatan	0	0	0,00	80.178.290	80.178.290	0
2.06.2.06.01.15.54	Pelayanan keliling pencatatan sipil (DAK)	Terlaksananya Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil di 21 Kecamatan di Kota Medan	21 kecamatan	21 kecamatan	0	0	0,00	80.178.290	129.713.290	325,33
2.06.2.06.01.15.55	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependuduk	330	110 kali	50 kali	28 kali	50 %	830.000.000	1.492.840.329	248,81
4.06.2.06.01.15	Program Pengembangan Data/ Informasi	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Proses Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku								
4.06.2.06.01.15.103	Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Jaringan,	18 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	0	9 kegiatan	50 %

		Penyusunan Buku Profil Kota Medan, Penyusunan Buku Data Penduduk per Semester dan Laporan Pengelolaan Data Kependudukan								
4.06.2.06.01.15.104	Informasi pelayanan dan peraturan administrasi keendudukan melalui media cetak dan elektronik	Terlaksananya Kegiatan Informasi Pelayanan dan Peraturan dministrasi Kependudukan Melalui Media Cetak dan Elektronik	0	57.224.000	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %	440.000.000	629.406.00 0	149,86
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik								
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi								
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	0	0	0	0	0	12 bln	0	0
2.12.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD	0	0	0	0	0	2 dokumen	0	0

	Triwulan/ Semesteran SKPD									
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia								
2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sewa tempat pengamanan dokumen dan asset administrasi kependudukan	0	0	0	0	0	12 bulan	0	0
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia								
2.12.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pakaian khusus pelayanan yang disediakan	0	0	0	0	0	242 orang	0	0
2.12.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pekaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi								
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listril/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		0	0	0	0	1 jenis	0	0

2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		0	0	0	0	11 jenis	0	0
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		0	0	0	0	26 jenis	0	0
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	0	0	0	0	0	21 jenis	0	0
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan	0	0	0	0	0	11 jenis	0	0
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	0	0	0	0	0	8772 eksemplar	0	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat, jumlah konsultasi dan koordinasi peningkatan pelayanan kependudukan	0	0	0	0	0	75 kali	0	0
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase cakupan penyelenggaraan								

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yan tersedia								
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur penunjang administrasi perkantoran	0	0	0	0	0	4 jenis	0	0
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	46 jenis	0	0
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa pengiriman dan perlengkapan pengiriman dokumen keperluan kantor	0	0	0	0	0	4 tw	0	0
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0	0	0	0	0	12 bulan	0	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	0	0	0	0	0	58 orang	0	0
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara								

2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia		0	0	0	0	20 unit	0	0
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dirawat atau diperbaiki	0	0	0	0	0	1 kegiatan	0	0
2.12.01.2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	0	0	0	0	0	4 kegiatan	0	0
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan Sipil								
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan sipil								
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan sipil	0	0	0	0	0	21 kecamatan	0	0
2.12.03.2.02.06	Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan Pencatatan sipil	0	0	0	0	0	2850 rim	0	0

2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pendaftaran penduduk								
2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk								
2.12.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kebutuhan barang pencegahan penyakit menular dalam peningkatan pelayanan pendaftaran kependudukan	0	0	0	0	0	2 kegiatan	0	0
2.12.02.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	0	0	0	0	0	2850 rim	0	0
2.12.02.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penyelenggaraan penduduk								
2.12.02.03.02	Penyelenggaraan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	0	0	0	0	0	21 kecamatan	0	0

2.12.02.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah kebutuhan fasilitasi pendaftaran	00	0	0	0	0	1 kegiatan	0	0
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database	0	0	0	0	0	2 kegiatan	0	0
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan inventarisasi data administrasi kependudukan	200.000.000	0	0	0	0	2 kegiatan	0	0
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan penatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Caca Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	0	0	0	0	0	4 kegiatan	0	0

2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	0	0	0	0	0	3 kegiatan	0	0
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	0	0	0	0	0	2 kegiatan	0	0
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah kegiatan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	0	0	0	0	0	1 kegiatan	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

2.2.1 IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan

Secara umum kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sudah baik yaitu telah mencapai target IKM tahun 2020 mencapai 84,5 % dari target sebesar 85 % atau mencapai 99,49 %. Capaian kinerja ini diperoleh karena adanya perubahan metode pelayanan yang semula stelsel pasif menjadi stelsel aktif, pelayanan menggunakan system online, pengembangan berbagai inovasi pelayanan seperti pelayanan keliling jemput bola ke Kelurahan - Kelurahan, sekolah, rumah sakit dan tempat lainnya, kerjasama *sharring database* data kependudukan, sosialisasi dan publikasi administrasi kependudukan melalui radio, media televisi (iklan layanan masyarakat melalui animasi dan profil kependudukan), media sosial (*website, instagram, facebook* dan *whats app*), media cetak (plank informasi yang diletakkan disemua kecamatan, spanduk, banner, papan dan cetakan pengumuman, brosur dan *booklet*), penerapan media layanan pengaduan, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diharuskan, termasuk semakin baiknya komitmen dan etika pelayanan yang diterapkan dengan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Adapun unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh masyarakat adalah unsur biaya/ tarif, kompetensi pelaksana dan pelaku pelaksana, sedangkan

unsur yang dianggap kurang memuaskan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas serta penanganan pengaduan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan terus menerus terutama perilaku pelaksana dengan melaksanakan Bimbingan Teknik (Bimtek) *Service Excellence* bagi petugas *Front Office/ Front Liner, Customer Service, Customer Care*, penyederhanaan Standar Pelayanan (SP), Standar Operator Pelayanan (SOP), termasuk peningkatan prasarana dan sarana pelayanan yang lebih memadai.

2.2.2 Persentase Data yang Akurat

Tersedianya *database* kependudukan yang valid atau akurat dapat digunakan sebagai data/ masukan/ bahan untuk pembangunan. *Database* kependudukan juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu, dan pilkada serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka program pembangunan kota.

Akurasi data kependudukan adalah data kependudukan berdasar aplikasi *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dibandingkan dengan data konsolidasi bersih (DKB) dengan target untuk tahun 2020 adalah 97,00 % sedangkan pencapaian akurasi data kependudukan adalah 95,59 % atau mencapai 98,54 % dari target. Belum tercapainya akurasi data sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini karena banyak penduduk yang tidak melaporkan perubahan data seperti apabila ada bagian dari keluarganya yang meninggal atau ada jiwa dalam keluarga yang pindah ke luar Kota Medan, demikian juga yang lahir.

2.2.3 Presentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK (Kartu Keluarga) yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK (Kartu Keluarga) dibagi dengan kepala keluarga yang wajib KK (Kartu Keluarga). Pada tahun 2020, kepala keluarga yang mempunyai KK (Kartu Keluarga) di Kota Medan sebanyak 709.508 keluarga dengan jumlah target kepala keluarga yang wajib KK (Kartu Keluarga) sebanyak 720.000 keluarga, maka prosentase kepala keluarga yang mempunyai KK (Kartu Keluarga) sebesar 98,54 %.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 99 %, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 99,53 % (hampir mendekati keseluruhan kepala keluarga yang ada di Kota Medan).

2.2.4 Presentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

Indikator ini menggambarkan presentase jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), yang pengukurannya didasarkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dari seluruh wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang ada. Pada tahun 2020 jumlah penduduk ber Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di Kota Medan sebanyak 1.786.043 orang, dengan jumlah penduduk wajib ber-KTP-EI sebanyak 1.853.618 orang maka prosentase penduduk ber-KTP-EI sebesar 96,53 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 99 %, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 97,32 %, hal ini disebabkan karena kedinamisan kependudukan di Kota Medan yang berdekatan dengan beberapa kabupaten/ kota lain

yang ada disekitarnya, menyebabkan tingginya arus perpindahan penduduk di Kota Medan, namun belum seluruhnya belum diimbangi kesadaran pelaporannya.

2.2.5 Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

Indikator ini menggambarkan presentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah kelahiran. Pada tahun 2020 penduduk lahir yang telah memiliki akta kelahiran di Kota Medan sebanyak 652.445 orang dengan jumlah kelahiran sebanyak 796.207 orang, maka presentase penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebesar 81,94 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 85 % maka capaian kinerja indikator ini sebesar 96,40 % (belum mencapai dari target yang ditetapkan).

2.2.6 Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang telah memiliki akta kematian yang pengukurannya di dasarkan pada jumlah penduduk mati yang telah memiliki akta kematian dibagi dengan jumlah kematian. Pada tahun 2020 penduduk mati yang telah memiliki akta kematian di Kota Medan sebanyak 3.488 orang dengan jumlah kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebanyak 3.488 orang, maka presentase penduduk yang telah memiliki akta kematian sebesar 100 %. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 100 % maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100 % (sudah memenuhi target yang ditetapkan).

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Penduduk yang terlayani KTP-EI	-	-	1.650.000 jiwa	1.700.000 jiwa	1.800.000 jiwa	2.100.000 jiwa	1.636.548 Jiwa	1.694.679 jiwa	1.783.054 jiwa	2.048.310 jiwa	-
2	Jumlah Penduduk yang terlayani Kartu Keluarga	-	-	660.000 KK	670.000 KK	700.000 KK	144.000 KK	656.949 KK	664.843 KK	709.508 KK	800.889 KK	-
3	Jumlah Penduduk yang memohon Akta Kelahiran	-	-	58.000 akta	63.000 akta	68.000 akta	73.000 akta	508.907 akta	605.201 akta	652.445 akta	775.888 akta	-
4	Jumlah Suami Istri non Muslim yang mencatatkan Perkawinannya	-	-	6.700 akta	7.200 akta	7.700 akta	8.200 akta	5.925 akta	7.558 akta	4.357 akta	5.446 akta	-
5	Jumlah Peristiwa Penerbitan Akta Kematian	-	-	215 akta	220 akta	225 akta	230 akta	2.210 akta	220 akta	225 akta	230 akta	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan PD

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selama tahun 2020 termasuk dalam kategori cukup baik karena dari ke 5 (lima) indikator kinerja ditetapkan, telah memenuhi target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan;
2. Penerapan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi melayani (WBM);
3. Peningkatan integritas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang tervalidasi di *data base*;
5. Peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi ke tingkat kelurahan;
6. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai penjabaran dari visi misi Pemerintah Kota Medan akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu **“Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil“**, termasuk **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Adapun tantangan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, antara lain :

- 1) Mobilitas penduduk yang tinggi;
- 2) Standar pelayanan publik yang belum dapat sepenuhnya diterapkan secara konsisten;
- 3) Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang gratis, mudah dan cepat;
- 4) Masih terbatasnya anggaran untuk pelayanan publik;
- 5) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan persyaratan dan prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 6) Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- 7) Lokasi gedung yang sudah kurang memadai untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan yang optimal;
- 8) Pelayanan administrasi kependudukan yang bebas pungli.

selanjutnya peluang peningkatan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai berikut :

- 1) Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses untuk mendorong transformasi digital;
- 2) Dokumen kependudukan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dan pemenuhan syarat administrative;
- 3) Komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan;
- 4) Adanya pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan;
- 5) Peningkatan tata kelola informasi administrasi kependudukan yang lebih baik dengan cara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan media informasi *online* melalui *call center* dan media sosial;
- 6) Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.

2.3.5 Formulasi Isu – Isu Penting berupa Rekomendasi dan Pencatatan yang Strategis Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dari isu – isu penting tersebut di atas dapat diformulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Adanya political will pimpinan OPD dengan Kepala Daerah;
- 2) Terpenuhinya rasio kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Terpenuhinya integritas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang prima.
- 5) Terciptanya zona yang kondusif dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
- 6) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Efektifnya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA).

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan instansi yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Catatan Sipil Kota Medan. Tugas utamanya adalah melaksanakan pencatatan sipil. Pencatatan sipil sendiri merupakan suatu upaya hukum pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak dan kematian. Sebagai hasil absorpsi dari masa pemerintahan kolonial Belanda, pada awalnya pelaksanaan catatan sipil oleh pemerintah Indonesia bersifat pluralis. Artinya catatan sipil dilaksanakan dengan penggolongan - penggolongan warga Negara Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 *Indische Satatregeling* dengan ketentuan :

1. Untuk orang Eropa digunakan Reglement pencatatan sipil *Eropa Staatblad* 1849;
2. Untuk perkawinan campuran ditetapkan penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No.158;
3. Untuk Tionghoa digunakan *Statblad* 1917;
4. Untuk orang Indonesia digunakan *Staatblad* 1920, dan bagi orang Indonesia Kristiani, Jawa, Madura, Ambon, *Staatblad* digunakan 1933;

5. KUH perdata pembagian ini berubah sejak tanggal 27 September 1966, Universitas Sumatera Utara.

Berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/u/IN/122/1966 yang mengatur bahwa warga Negara dibedakan atas Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Sejalan dengan perkembangan tugas Kantor Catatan Sipil, terjadi pula perkembangan hukum individu. Diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sementara itu, berkaitan dengan peraturan dan peningkatan Pembina penyelenggaraan catatan sipil lahirilah Kepres No.12/1983 dan Keputusan Mendagri No.54/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotamadya.

Tugas lain yang dijalankan oleh Kantor Catatan Sipil berikutnya adalah administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan :

1. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.2A/1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.150/1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
4. Peraturan Daerah No.1/1998 tentang Penyelenggaraan Penduduk dalam Rangka Kotamadya Tingga II Medan;
5. Keputusan Walikota Medan No.474/1273/SK/1998 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Menyusul Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001, Keputusan Walikota Medan No.24 Tahun 2001, Kantor Catatan Sipil mengalami perubahan dan perluasan tugas menjadi Dinas Kependudukan. Dengan demikian, disamping masih melaksanakan tugas-tugas pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan juga melaksanakan tugas-tugas kependudukan lainnya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan Dinas Kependudukan Kota Medan Berubah Menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi sistem administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan dalam RKPD belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi sepenuhnya dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan- perbaikan dan penambahan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan signifikan dari komposisi anggaran. Dan selanjutnya disajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Medan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100 %	39.223.664.431,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100 %	37.597.101.830,-	-
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	377.208.000,-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	377.208.000,-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 kegiatan	377.208.000,-	Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	8 orang	377.208.000,-	-
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan administrasi keuangan perangat daerah yang terpenuhi	4 tw	18.295.545.600,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan administrasi keuangan perangat daerah yang terpenuhi	4 tw	18.295.545.600,-	-
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Frekuensi pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	12 kali	18.168.968.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Frekuensi pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	4 tw	18.168.968.000,-	-

5	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD	2 kegiatan	126.577.600,-	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD	4 tw	126.577.600,-	-
6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	126.577.600,-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	120.000.000,-	-
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah sewa tempat pengamanan dokumen dan asset administrasi kependudukan	12 bulan	120.000.000,-	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah sewa tempat pengamanan dokumen dan asset administrasi kependudukan	12 bulan	120.000.000,-	-
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	100 %	1.010.800.194,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	100 %	325.449.394,-	-
9	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pakaian khusus pelayanan yang disediakan	6 jenis	69.904.000,-	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pakaian khusus pelayanan yang disediakan	4 tw	75.803.200,-	-
10	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	214 org/ set	249.646.194	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	4 tw	249.646.194,-	-
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dampak kependudukan beserta solusi dari strategis sebagai peringatan dampak dari kependudukan kepada pemangku kepentingan	150 Orang	691.250.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dampak kependudukan beserta solusi dari strategis sebagai peringatan dampak dari kependudukan kepada pemangku kepentingan	1 keg	691.250.000,-	-
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	4.782.504.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	4.462.534.400,-	-

13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	100.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 keg	100.000.000,-	-
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	2.976.160.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 keg	2.993.660.000,-	-
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Jenis	100.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 jenis	100.000.000,-	-
16	Penyediaan bahan logistic kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	3 Jenis	200.860.000,-	Penyediaan bahan logistic kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	1 keg	201.252.000,-	-
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah barang cetakan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan	3 Jenis	490.944.000,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah barang cetakan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan	4 tw	491.082.400,-	-
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	8772 Eksemplar	39.840.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 tw	39.840.000,-	-
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah makan dan minum rapat, jumlah konsultasi dan koordinasi peningkatan pelayanan kependudukan	4 Kali	536.700.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah makan dan minum rapat, jumlah konsultasi dan koordinasi peningkatan pelayanan kependudukan	12 bulan	536.700.000,-	-
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pelayanan administrasi kependudukan	2 Dokumen	338.000.000,-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pelayanan administrasi kependudukan	5 Jenis	338.000.000,-	-

21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan penyelenggaraan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	9.002.012.801,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan penyelenggaraan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia	100%	8.752.978.600,-	-
22	Pengadaan Mebel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya mebeleur penunjang administrasi perkantoran	3 Jenis	632.442.801,-	Pengadaan Mebel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya mebeleur penunjang administrasi perkantoran	1 keg	632.408.600,-	-
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	14 Jenis	4.844.200.100,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	1 keg	8.120.570.000,-	-
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.207.593.836,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.207.593.836,-	-
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penyediaan jasa pengiriman dan perlengkapan pengiriman dokumen keperluan kantor	1 Jenis	135.728.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penyediaan jasa pengiriman dan perlengkapan pengiriman dokumen keperluan kantor	1 keg	135.728.000,-	-
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Jenis	1.647.120.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 keg	1.647.120.000,-	-
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	59 Orang	2.424.745.836,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	1 dok	2.424.745.836,-	-
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	1.428.000.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	1 keg	1.433.000.000,-	-

29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	20 Unit	330.000.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	100 %	335.000.000,-	-
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peralatan kantor yang dirawat atau diperbaiki	6 Jenis	450.000.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peralatan kantor yang dirawat atau diperbaiki	21 kec	450.000.000,-	-
31	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	6 Kegiatan	648.000.000,-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	1 keg	648.000.000,-	-
II	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan Sipil	100%	236.871.800,-	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan Sipil	78,25%	236.871.800,-	-
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan sipil	100%	236.871.800,-	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan sipil	100%	236.871.800,-	-
2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan sipil	21 Kecamatan	36.871.800,-	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan sipil	21 kec	36.871.800,-	-
3	Fasilitasi terkait Pancatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan Pencatatan sipil	1 Jenis	200.000.000,-	Fasilitasi terkait Pancatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan Pencatatan sipil	1 keg	200.000.000,-	-

III	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pendaftaran penduduk	100%	1.380.527.900,-	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pendaftaran penduduk	100%	1.381.527.900,-	-
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	913.116.000,-	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	913.116.000,-	-
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan barang pencegahan penyakit menular dalam peningkatan pelayanan pendaftaran kependudukan	2 Jenis	140.000.000,-	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan barang pencegahan penyakit menular dalam peningkatan pelayanan pendaftaran kependudukan	4 keg	140.000.000,-	-
3	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	4 Jenis	773.116.000,-	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	1 keg	773.116.000,-	-
4	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penyelenggaraan penduduk	21 Kec	467.411.900,-	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penyelenggaraan penduduk	1 keg	468.411.900,-	-
5	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan fasilitasi pendaftaran	2 Jenis	398.633.600,-	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan fasilitasi pendaftaran	2 Jenis	398.633.600,-	-
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1.889.069.000,-	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1.792.627.765,-	-

1	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database	100%	200.000.00,-0	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database	100%	200.000.000,-	-
2	Inventarisasi Data untuk Pentingan Pembangunan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan inventarisasi data administrasi kependudukan	2 Kegiatan	200.000.000,-	Inventarisasi Data untuk Pentingan Pembangunan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan inventarisasi data administrasi kependudukan	2 Kegiatan	200.000.000,-	-
3	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	400.000.000,-	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	400.000.000,-	-
4	Penyusunan Tata Caca Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 Kegiatan	400.000.000,-	Penyusunan Tata Caca Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 Kegiatan	400.000.000,-	-
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1.289.069.000,-	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1.192.627.765,-	-
6	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Kegiatan	480.000.000,-	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Kegiatan	480.000.000,-	-

7	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	3 Kegiatan	709.069.000,-	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	3 Kegiatan	712.627.765,-	-
8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Kegiatan	137.000.000,-	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Kegiatan	100.000.000,-	-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan kota tahun 2022, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi–asosiasipenyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi–asosiasipenyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat Kelurahan	Kelurahan	Loket pelayanan administrasi kependudukan kelurahan	151
2.	Meningkatkan sosialisasi Sadar Administrasi Kependudukan	Kelurahan	Jumlah sosialisasi GISA	151

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional Indonesia juga berkaitan dengan posisi sebagai negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya harus dioptimalkan. Dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2022 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 (Lima) program strategis nasional yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP Elektronik;
4. Bidang Pencatatan Sipil “**Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya**”;
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Oleh karena itu, kebijakan administrasi kependudukan di Kota Medan diinformasikan memiliki sinkronisasi yang kuat dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) PD

Tujuan dan saran pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, RPJP Daerah Kota Medan 2006-2025, RPJM Daerah Kota Medan 2021-2026 dan Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 2021-2026, sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan integritas penyelenggaraan/ pelaksanaan administrasi kependudukan;
2. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Mewujudkan akurasi, validitas serta konsistensi data kependudukan terhadap data dokumen autentik lain;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas koordinasi, komunikasi dan transformasi data kependudukan berbasis SIAK-ON LINE

3.2.2 Sasaran

1. Ditetapkannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaga Zone Integritas (ZI) WBK;
2. Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kenyamanan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Meningkatnya kualitas Pencatatan biodata penduduk pada database kependudukan berdasarkan sumber data dokumen autentik lain;
4. Meningkatnya pengembangan sistem aplikasi, dan pembangunan jaringan komunikasi data antar lembaga (*E-Government*).

Tabel TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Medan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indicator kinerja program/ kegiatan	Rencana tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja kebutuhan dana/ pagu indikatif	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.06	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	43.030.133.131,-	APBD	-	100%	45.637.733.236
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	39.223.664.431,-	APBD	-	100%	40.571.598.073
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	377.208.000,-	APBD	-	100%	377.200.000,-
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kegiatan	377.208.000,-	DAK	-	4 Kegiatan	125.587.300

2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	18.295.545.600,-	APBD	-	100%	18.294.555.301,-
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Kali	18.168.968.000,-	APBD	-	12 Kali	18.168.968.001
2.12.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Kegiatan	126.577.600,-	APBD	-	2 Kegiatan	125.587.300,-
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	120.000.000,-	APBD	-	100%	120.000.000,-
2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sewa tempat pengamanan dokumen dan asset administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	120.000.000,-	APBD	-	12 Bulan	120.000.000,-
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.010.800.194,-	APBD	-	100%	308.016.600
2.12.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pakaian khusus pelayanan yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Jenis	69.904.000,-	APBD	-	6 Jenis	148.303.200
2.12.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pekaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	214 Org/ Set	249.646.194,-	APBD	-	214 Org/ Set	159.713.400
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dampak kependudukan beserta solusi dari strategis sebagai	Dinas Kependudukan	150 Orang	691.250.000,-	DAK	-	150 Orang	465.000.000,-

		peringatan dampak dari kependudukan kepada pemangku kepentingan	dan Pencatatan Sipil						
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	4.782.504.000,-	APBD	-	100%	5.627.856.000
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	100.000.000,-	APBD	-	2 Jenis	32.242.400
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	2.976.160.000,-	APBD	-	2 Jenis	4.448.670.000
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	100.000.000,-	APBD	-	1 Jenis	86.385.850
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	200.860.000,-	DAK	-	3 Jenis	211.335.750
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	490.944.000,-	APBD	-	3 Jenis	534.362.000
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-0undangan yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8772 Eksemplar	39.840.000,-	APBD	-	8772 Eksemplar	39.840.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat, jumlah konsultasi dan koordinasi peningkatan pelayanan kependudukan	Dinas Kependudukan	4 Kali	536.700.000,-	APBD	-	4 Kali	275.020.000

			dan Pencatatan Sipil						
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pelayanan kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	338.000.000,-	APBD	-	2 Dokumen	388.000.00,-
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan penyelenggaraan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	9.002.012.801,-	APBD	-	100%	9.590.544.336
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur penunjang administrasi perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	632.442.801,-	APBD	-	3 Jenis	340.187.200
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14 Jenis	8.369.570.000,-	APBD	-	14 Jenis	9.250.357.136
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	4.207.593.836,-	APBD	-	100%	4.576.625.836,-
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa pengiriman dan perlengkapan pengiriman dokumen keperluan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	135.728.000,-	DAK	-	1 jenis	228.080.000
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	1.647.120.000,-	APBD	-	3 Jenis	1.613.000.000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	Dinas Kependudukan	59 Orang	2.424.745.836,-	APBD	-	59 Orang	2.735.545.836

			dan Pencatatan Sipil						
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.428.000.000,-	APBD	-	100%	2.054.000.000
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 Unit	330.000.000,-	APBD	-	20 Unit	584.000.000
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dirawat atau diperbaiki	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Jenis	450.000.000,-	APBD	-	6 Jenis	345.000.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Kegiatan	648.000.000,-	APBD	-	6 Kegiatan	1.125.000.000
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan Sipil		78,25%	236.871.800,-	APBD	-	80,25%	236.871.800,-
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	236.871.800,-	APBD	-	100%	236.871.800,-
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21 Kecamatan	36.871.800,-	APBD	-	21 Kecamatan	36.871.800,-

2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan Pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	200.000.000,-	APBD	-	1 Jenis	200.000.000,-
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.380.527.900,-	DAK	-	100%	1.084.769.300
2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	913.116.000,-	DAK	-	100%	593.116.000
2.12.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kebutuhan barang pencegahan penyakit menular dalam peningkatan pelayanan pendaftaran kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	140.000.000,-	DAK	-	2 Jenis	400.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun 2022 ditetapkan rencana kinerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 sebagai berikut :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah RKPD	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.06	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	42.375.316.955	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	38.577.012.560	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	151.690.000	APBD
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kegiatan	151.690.000	APBD
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	17.591.108.600	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Kali	17.465.281.000	APBD
2.12.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Kegiatan	125.827.600	APBD
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	120.000.000	
2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sewa tempat pengamanan dokumen	Dinas Kependudukan	12 Bulan	120.000.000	APBD

		dan asset administrasi kependudukan	dan Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	843.304.000	
2.12.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah pakaian khusus pelayanan yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Jenis	69.904.000	APBD
2.12.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pekaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	214 Org/ Set	216.804.000	APBD
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dampak kependudukan beserta solusi dari strategis sebagai peringatan dampak dari kependudukan kepada pemangku kepentingan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Orang	626.500.000	APBD, DAK
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	5.106.312.000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	100.000.000	APBD
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	2.458.090.000	APBD, DAK
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	120.000.000	APBD
2.12.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	206.568.000	APBD
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	461.114.000	APBD
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8772 Eksemplar	39.840.000	APBD
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat, jumlah konsultasi dan	Dinas Kependudukan	4 Kali	432.700.000	APBD, DAK

		koordinasi peningkatan pelayanan kependudukan	dan Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pelayanan kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	228.000.000	APBD, DAK
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan penyelenggaraan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	8.345.331.300	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur penunjang administrasi perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	570.180.800	APBD
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14 Jenis	7.775.150.500	APBD
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	4.602.536.660	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa pengiriman dan perlengkapan pengiriman dokumen keperluan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	245.600.000	APBD, DAK
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	1.970.520.000	APBD
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59 Orang	2.386.416.660	APBD
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.816.730.000	APBD
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 Unit	365.000.000	APBD
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dirawat atau diperbaiki	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Jenis	550.000.000	APBD
2.12.01.2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Dinas Kependudukan	6 Kegiatan	901.730.000	APBD

	Kantor dan Bangunan Lainnya		dan Pencatatan Sipil			
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan Sipil		78,25%	454.338.600	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	454.338.600	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21 Kecamatan	54.015.000	APBD
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kebutuhan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan Pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	400.323.600	APBD
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.820.001.600	
2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.271.478.500	
2.12.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kebutuhan barang pencegahan penyakit menular dalam peningkatan pelayanan pendaftaran kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	140.000.000	APBD
2.12.02.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah kebutuhan blanko dan alat tulis perlengkapan pencetakan dokumen administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Jenis	174.000.000	APBD
2.12.02.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penyelenggaraan penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	548.523.100	
2.12.02.03.02	Penyelenggaraan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	144 Kali	78.199.500	APBD
2.12.02.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah kebutuhan fasilitasi pendaftaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	470.323.600	APBD

2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.523.964.195	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	200.000.000	APBD
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan inventarisasi data administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Kegiatan	200.000.000	APBD
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	303.050.000	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Kegiatan	303.050.000	APBD
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	1.020.914.195	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Kegiatan	783.050.000	APBD
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Kegiatan	137.020.000	APBD
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah kegiatan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	100.844.195	APBD

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	38.554.967.131,-
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.475.166.000,-
3	Denda Retribusi	569.212.950,-

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistic yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek keamanan. Maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Guna optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maka

Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi kedepan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti. Didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan, dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

5.3. Rencana Tidak Lanjut

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi informatika melalui bintek, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang. Hal ini berakibat kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang. Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah merekrut Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 57 orang dengan harapan agar Pekerja Harian Lepas (PHL) tersebut nantinya dapat dipertimbangkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta berdasar dinamika tuntutan masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melaksanakan kegiatan pelayanan keliling untuk lokasi yang jauh dari pelayanan seperti sekolah, pondok pesantren dan tempat lainnya.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, dibutuhkan kendaraan operasional roda 4 (mobil operasional) yang memadai. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang dapat kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang berbasis SIAK *on line* di tahun 2022.

Medan, 03 Februari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**



**Drs. ZULKARNAIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650127 198603 1 003**

